

## SINOPSIS

Dengan hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian di revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang berdasarkan asas desentralisasi memberikan keleluasaan terhadap Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk dapat menentukan arah kebijakan secara khusus dan pengurusan rumah tangganya sendiri, dan sangat memungkinkan bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Daerah/Kota untuk memekarkan wilayahnya, termasuk pula dalam bidang evaluasi kebijakan pemekaran wilayah yang menimbulkan dampak pada aspek manajemen sumber daya aparatur daerah.

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis. Dalam pelaksanaan penelitian ini diwujudkan dalam berbagai tahapan penelitian yaitu, unit analisisnya adalah Pemerintah Kabupaten OKU, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi di Bagian Sekretariat Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten. Data-data yang di dapat dikumpulkan kemudian dinilai, berikutnya ditafsirkan dan terakhir disimpulkan dan penelitian ini mengambil judul "DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA" (Studi Kasus Aspek Manajemen Sumber Daya Aparatur Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005)

Pemekaran wilayah di Kabupaten OKU membawa dampak terhadap sumber daya aparatur daerah, yaitu kurangnya pegawai yang melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan, baik itu pegawai dalam jenjang jabatan struktural maupun pada tingkat pelaksana, sehingga mengakibatkan proses pemberian pelayanan publik tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten OKU dalam mengangkat dan menempatkan pegawainya untuk menduduki formasi-formasi jabatan yang ada pasca pemekaran wilayah.

Saran yang diajukan dari hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten OKU seharusnya mendata kembali aparatur-aparaturinya pasca pemekaran wilayah sehingga, tidak terjadi kekurangan pegawai baik pegawai dalam jenjang jabatan struktural maupun pada tingkat pelaksana. Pemerintah Kabupaten OKU hendaknya konsisten dalam mengembangkan sumber daya aparaturinya karena lemahnya sumberdaya aparatur Pemerintah Daerah, merupakan salah satu penyebab tidak maksimalnya peran Pemerintah Daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya, maupun terhadap pelaksanaan fungsi pelayanan kepada publik